



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2013 merupakan Tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016. Upaya keras telah dilakukan guna mewujudkan Visi : **“Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**. Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, Visi, Misi dan pelaksanaan program-program kegiatan telah mencoba direalisasikan dengan menimbang prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah memberikan arah implementasi prinsip akuntabilitas secara jelas. Berpedoman pada hal itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui LAKIP berusaha mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah. LAKIP melaporkan capaian kinerja (*performance result*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016.

Sesuai amanat RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016, visi Kabupaten Banjarnegara dijabarkan dalam 6 (enam) misi, 51 (lima puluh satu) sasaran strategis sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan misi Kabupaten Banjarnegara. Untuk mewujudkan ke-51 sasaran tersebut, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 yang terdiri dari Pendapatan sebesar Rp 1.241.180.983.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.279.702.465.966,- (103,10 %) dan Belanja sebesar Rp 1.405.366.623.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.175.474.028.855,- (83.64 %)

Dari 51 (lima puluh satu) sasaran yang ditetapkan diukur dengan 345 (tiga ratus empat puluh lima) indikator kinerja, 43 (empat puluh tiga) sasaran yang telah dicapai dengan hasil memuaskan, sebanyak 2 (dua) sasaran yang dicapai dengan hasil sangat baik, 3 (tiga) sasaran dengan hasil baik dan 3 (tiga) sasaran dengan hasil cukup. Adapun rata-rata dari ke 51 sasaran tersebut yaitu 109,22 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran pembangunan melalui LAKIP ini, menunjukkan masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Belum adanya sinkronisasi antara target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra dan Renja SKPD. Target yang ditetapkan dalam RKPD belum diaktualisasikan sesuai anggaran APBD sehingga target capaian kinerja sasaran belum selaras.
2. Ada beberapa indikator kinerja sasaran tidak didukung ketersediaan data. Indikator Kinerja Utama sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian sasaran belum sepenuhnya dipahami oleh masing-masing SKPD, dan belum adanya petunjuk teknis dari beberapa penerapan SPM sehingga SKPD belum dapat menggali data profil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pemahaman oleh masing-masing SKPD terhadap ketentuan pedoman Penyusunan LAKIP masih kurang sehingga penyusunan LAKIP belum optimal.

Adapun strategi pemecahan masalah di atas adalah :

1. Mengadakan evaluasi pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMD sehingga ada sinkronisasi antara RKPD dan Penetapan Kinerja SKPD.
2. Memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh, yaitu SKPD selain menyusun Renstra, TAPKIN dan LAKIP juga harus menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perubahan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang penyusunan LAKIP dan TAPKIN dengan menyelenggarakan rapat koordinasi sehingga masing-masing SKPD mempunyai persepsi yang sama dalam penyusunan LAKIP dan TAPKIN sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta masing-masing Kepala SKPD untuk memaparkan hasil LAKIPnya dihadapan tim pengarah sehingga akan diketahui kekurangan dalam penyusunannya.



Pencapaian sasaran strategis Tahun 2013 ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara makro pada tahun kedua masa bakti Bupati Banjarnegara periode 2011-2016 dan diharapkan mampu menjadi landasan yang baik untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Banjarnegara, Maret 2014

BUPATI BANJARNEGARA

SUTEDJO SLAMET UTOMO, S.H., M.Hum.